

KEBIJAKAN PERIKANAN YANG PRO NELAYAN TANGKAP

19

Achmad Sani Alhusain

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyampaikan program kerja prioritasnya kepada Komisi IV DPR RI. DPR RI dan berbagai stakeholder menaruh harapan besar, Menteri KKP Edhy Prabowo akan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan nelayan. Peningkatan kinerja perikanan tangkap laut masih menghadapi persoalan, sekitar 50% nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Tulisan ini mengkaji kinerja perikanan tangkap Indonesia dan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Lima kebutuhan dasar nelayan yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah: (a) akses permodalan, (b) bantuan kapal dan alat tangkap ikan, (c) kemudahan perizinan melalui penyederhanaan perizinan, (d) asuransi nelayan, dan (e) sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas nelayan, salah satunya menurunkan biaya logistik perikanan. Dalam hal ini, DPR RI perlu mengawasi implementasi berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di sektor perikanan ke depan.

Pendahuluan

Pada tanggal 6 November 2019, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka pengenalan dan penjelasan program-program prioritas. Menurut Menteri KKP Edhy Prabowo, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi

kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi. Target pertumbuhan PDB perikanan yang akan dicapai tahun 2020 sebesar 7,9% yang akan didukung dengan 26,46 juta ton peningkatan produksi perikanan, 3 juta ton produksi garam, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 58,39 kg/kapita/tahun, ekspor hasil perikanan senilai USD6,17 miliar, dan kawasan konservasi perairan



seluas 23,40 juta ha.

Komisi IV DPR RI menaruh harapan besar kepada Edhy Prabowo sebagai nakhoda KKP yang baru untuk dapat menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya. Arah kebijakan sebaiknya lebih memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Ketua Asosiasi Unit Pengolahan Ikan (AUI) Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Basmi Said dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Hendra Sugandhi menaruh harapan positif akan terbangunnya sektor kelautan dan perikanan kearah yang lebih baik (mongabay.co.id, 19 November 2019). Namun demikian, KKP masih harus menyelesaikan banyak persoalan, khususnya yang dihadapi masyarakat nelayan tangkap

Indonesia. Menurut Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Maman Hermawan, mayoritas klaster perikanan nelayan berada dalam status kemiskinan. Sekitar 50% lebih kawasan klaster perikanan rakyat masih belum sejahtera (republika.co.id, 22 Oktober 2019). Tulisan ini mengkaji kinerja perikanan tangkap Indonesia, dan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Kinerja Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap selama periode tahun 2013-2018 menunjukkan tren yang terus meningkat (Grafik 1). Pada tahun 2013 hanya 5,7 juta ton dan pada tahun 2018 berhasil mencapai 6,7 juta ton. Hingga kuartal III 2019 produksi perikanan tangkap mencapai 5,1 juta ton (bisnis.tempo.co, 26 November 2019).

Seiring peningkatan sisi produksi, meskipun volume dan nilai ekspor hasil perikanan tangkap laut pada periode tahun 2014-2015 sempat mengalami penurunan tetapi sejak tahun 2015 hingga 2018 volume dan nilai ekspor hasil perikanan tangkap menunjukkan tren yang kembali meningkat. Pada tahun



Sumber: kkp.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Grafik 1. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Tahun 2013-2018

2018, volume ekspor meningkat sebesar 4,64% dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1.078.000 ton menjadi 1.126.000 ton dan nilai ekspor meningkat \pm 7,44% menjadi USD4.861 juta dari tahun 2017 yang hanya USD4.534 (kkp.go.id, 2019).

Selanjutnya, kesejahteraan nelayan semakin membaik seiring dengan meningkatnya NTN dalam beberapa tahun ini. NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan besarnya harga yang dibayarkan oleh nelayan. NTN rata-rata memiliki tren yang terus naik selama 5 tahun terakhir. Semula pada tahun 2014 sebesar 104,63 dan terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 113,28. Perkembangan terakhir NTN bulan September 2019 sebesar 114,79, naik sebesar 0,09% dibandingkan bulan September 2018 (114,69). Kondisi ini menunjukkan daya beli nelayan lebih baik pada September 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga terdapat peningkatan sebesar 0,48%, yaitu dari 114,24 (Agustus 2019) menjadi 114,79 (September 2019).

KKP mengklaim bahwa NTN meningkat akibat dari kenaikan pendapatan nelayan yang disebabkan peningkatan nilai produksi ikan sejalan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM), air bersih, es dan pasar. Dilain pihak, biaya yang dikeluarkan nelayan relatif stabil, sedangkan biaya distribusi/transportasi berkurang karena kebutuhan nelayan telah terpenuhi di area pelabuhan perikanan

(Dirjen Perikanan Tangkap, 2018). Berdasarkan paparan tersebut, kinerja perikanan tangkap laut Indonesia membaik dalam lima tahun terakhir dilihat dari indikator produksi, volume, dan nilai ekspor perikanan tangkap serta NTN.

Penyempurnaan Kebijakan Agar Lebih Pro-Nelayan

Program kerja pemerintah melalui KKP selama 5 tahun telah mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan nelayan. Namun, kegemilangan ini masih menyisakan berbagai masalah. Menteri Edhy Prabowo akan meneruskan dan meningkatkan kebijakan kelautan dan perikanan yang sudah baik. Prioritasnya adalah mengeluarkan kebijakan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebagai catatan bahwa ada lima kebutuhan dasar nelayan yang harus dipenuhi agar nelayan mampu bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pertama, bantuan pinjaman modal (permodalan) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan suku bunga 6% per tahun atau lebih rendah dibandingkan suku bunga yang sama tahun sebelumnya sebesar 7% per tahun. Melalui program bantuan KUR, pemerintah memberikan keringanan kebijakan lain yakni kredit tanpa ada agunan dengan nilai pinjaman maksimal Rp50 juta. Agunan diberlakukan pada program bantuan KUR, jika pinjaman mencapai Rp500 juta dengan nilai agunan hanya 3% dari jumlah total pinjaman (mediaindonesia.com, 17 November

2019).

Kedua, bantuan kapal beserta alat tangkap ikan dalam rangka penguatan kemampuan tangkap nelayan. Optimalisasi pemanfaatan kapal-kapal asing yang ditangkap akibat aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (IUUF) untuk diberikan kepada nelayan (Koran Jakarta, 19 November 2019). Menurut Ruslan Tawari (Universitas Pattimura, Ambon), eforia penenggelaman kapal telah berlalu. Sebanyak 516 kapal asing berhasil ditenggelamkan. Ironisnya, masih banyak nelayan lokal yang tidak memiliki perahu motor dan mencari ikan dengan menggunakan perahu dayung kecil. Kondisinya banyak nelayan berhutang kepada rentenir dengan bunga tinggi sehingga sulit keluar dari kemiskinan (Kompas, 19 November 2019). Meskipun wacana kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra tetapi selama suatu kebijakan dikeluarkan dengan kajian yang komprehensif, maka tingkat dampak positifnya diyakini akan lebih besar dari dampak negatifnya. Apabila kebijakan ini dikeluarkan untuk kepentingan nelayan nasional dan pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain itu, pemerintah dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk penenggelaman kapal, dan memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih produktif.

Edhy Prabowo berencana untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik

(*Seinen Nets*). Menurut Guru Besar Lingkungan Laut Universitas Diponegoro, Prof Dr Johannes Hutabarat, sampai sekarang belum ada satu penelitian atau kajian yang benar-benar bisa digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa cantrang merusak lingkungan (bbc.com, 17 Januari 2018). Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kajian khusus mengenai dampak dari penggunaan cantrang.

Ketiga, fasilitasi untuk memperoleh izin menangkap ikan yang murah, mudah dan cepat. Selama ini waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI), sekitar tiga bulan. Belum lagi rentetan persyaratan yang harus disiapkan, dinilai memberatkan para nelayan. (nasional.kontan.co.id, 2 November 2019). Edhy Prabowo berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dan sepakat untuk menyederhanakan proses perizinan kapal tangkap ikan dari 14 hari menjadi 1 jam. Izin kapal tangkap 10-30 GT kewenangan provinsi dan di atas 30 GT kewenangan KKP (Neraca, 27 November 2019).

Keempat, bantuan asuransi nelayan. Profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut. Untuk itu, program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dimulai direalisasikan pada tahun

2017 merupakan kebijakan KKP pada saat kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti harus dilanjutkan dan diperluas penerimanya.

Berdasarkan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, perairan Maluku menyumbang 30% tangkapan ikan Nusantara. Sayangnya nelayan lokal minim sentuhan pemberdayaan. Di Maluku ada sekitar 150.000 rumah tangga nelayan. Kurang dari 10% yang merasakan program pemberdayaan (Kompas, 19 November 2019). Untuk itu, pemberdayaan nelayan perlu juga diarahkan untuk memberikan solusi alternatif bagi nelayan pada saat musim paceklik. Harapannya nelayan yang miskin dan rentan masuk kategori masyarakat miskin dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui program pemberdayaan yang lebih tepat.

Kelima, dukungan sarana tempat pelelangan ikan yang terjangkau. Menurut Pengusaha perikanan di Maluku, Kun Kusno, masalah terbesar usaha perikanan adalah mahal biaya angkutan logistik. Contoh, pengiriman ikan dari Ambon ke Surabaya menggunakan kapal laut Rp2.200,- per kg. Begitu pula tarif kargo pesawat dari Bandara Pattimura ke Jakarta Rp31.000,- per kg (Kompas, 19 November 2019). Diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem logistik perikanan agar tidak terlalu membebani pelaku usaha perikanan. Perbaikan ini menjadi penting agar harga ikan di tingkat nelayan tangkap menjadi lebih baik dan pada akhirnya mampu mendorong kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik.

Penutup

Kinerja perikanan tangkap

Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun di tengah pencapaian yang luar biasa tersebut masih menyisakan beberapa persoalan. Harapan akan terjadinya peningkatan kesejahteraan nelayan yang berimbas kepada peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo. Sejumlah kebijakan yang sudah berjalan dengan baik perlu diteruskan dan ditingkatkan efektivitasnya. KKP juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebijakan seperti (a) akses permodalan, (b) bantuan kapal dan alat tangkap ikan, (c) kemudahan perizinan, (d) asuransi nelayan, serta (e) sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas nelayan salah satunya menurunkan biaya logistik perikanan yang dirasakan membebani masyarakat nelayan. Dalam kaitan ini, DPR RI perlu mengawasi implementasi berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di sektor perikanan ke depan.

Referensi

- “50% Nelayan Indonesia di Bawah Garis Kemiskinan”, <https://republika.co.id/berita/pzrjiv383/50-persen-nelayan-indonesia-di-bawah-garis-kemiskinan>, diakses 18 November 2019.
- “Capaian Kinerja Program 4 Tahun KKP”, <https://kkp.go.id/infografis-detail/2633-pencapaian-kinerja-program-4-tahun-kkp>, diakses 19 November 2019
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2018). “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2018”. Jakarta: Kementerian Kelautan dan

Perikanan.
 “IKM Perikanan Disarankan Bermitra Dengan Bank”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/272117-ikm-perikanan-disarankan-bermitra-dengan-bank>, diakses 18 November 2019.
 “Melihat Masalah dari Sarang Ikan”, *Kompas*, 19 November 2019, hal. C.
 “Menyoal Perizinan Perikanan Di Perairan Lokal”, https://nasional.kontan.co.id/news/menyoal-perizinan-perikanan-di-perairan-lokal-bagian-1?utm_source=dable, diakses 19 November 2019.
 “Nelayan Minta Hasil Lelang Kapal Trawl Tak Dilepas ke Pemilik”, <https://bisnis.tempo.co/read/1275291/nelayan-minta-hasil-lelang-kapal-trawl-tak-dilepas-ke-pemilik>, diakses 26 November 2019.
 “Optimisme Para Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Dengan

Program Menteri Baru”, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/18/optimisme-para-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan-nusantara-dengan-program-menteri-baru/>, diakses 19 November 2019.

“Pelaku Usaha Perlu Kepastian Hukum”, *Kompas*, 19 November 2019, hal.14.

“Pelarangan Cantrang: Mengapa Pemerintah Tak Bisa Menentukan Sikap?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42705861>, diakses 26 November 2019.

“Penenggelaman Kapal Dihentikan”, *Koran Jakarta*, 19 November 2019, hal. 7.

“Regulator Ingin Perizinan Kapal Ikan Bisa Selesai Satu Jam”, *Neraca*, 27 November 2019, hal.11.



Achmad Sani Alhusain
achmad.alhusain@dpr.go.id

Achmad Sani Alhusain, SE, MA., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada tahun 1998 dan pendidikan S2 Master of Art in Economic Policy di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Publik pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif” (2015), “Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.